

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan Periode 2010-2014 menunjukkan keaktifannya dalam dunia internasional, khususnya dalam interaksinya dengan negara-negara berkembang lainnya. Berbagai bantuan yang diberikan melalui berbagai program kegiatan seperti pelatihan, *workshop*, beasiswa dan bantuan alat mesin pertanian kepada negara-negara berkembang lain menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai aktor yang diakui oleh dunia internasional. Ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia dalam hal meningkatkan perannya dalam Kerjasama Selatan-Selatan sekaligus mencapai kepentingan nasional, yaitu dengan memanfaatkan dinamika internasional, kebijakan nasional, mekanisme pendanaan dan pengalaman Indonesia sendiri.

Dalam konteks sejarah sendiri, Indonesia sudah berperan bahkan bisa dibilang sangat penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia telah meletakkan landasan politik Kerjasama Selatan-Selatan dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 1955. Indonesia juga turut memprakarsai Gerakan Non-blok (GNB) pada 1961. Sedangkan pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, Kerjasama Selatan-Selatan tidak terlalu menjadi prioritas. Hal ini dilatarbelakangi kepentingan Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara maju dalam rangka meningkatkan investasi asing. Kerjasama Selatan-Selatan di era Soeharto baru menjadi fokus perhatian yang lebih besar ketika Indonesia menjadi tuan rumah dan ketua GNB 1992, dan sebagai hasilnya dibentuklah *NAM Center of South-South Technical Cooperation (NAM-CSSTC)*.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), visi politik luar negeri tidak begitu diimplementasikan karena pemerintah banyak disibukkan dengan agenda politik dalam negeri. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Kerjasama Selatan-Selatan kurang menjadi prioritas dalam agenda politik luar negeri karena lebih banyak berprioritas pada

hubungan dengan negara maju. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Kerjasama Selatan-Selatan seperti dilaksanakannya peringatan 50 tahun KAA di Bandung pada tahun 2005, penandatanganan "*Jakarta Commitment*" pada tahun 2009, dan dimasukkannya Kerjasama Selatan-Selatan dalam RPJMN 2010-2014.

Peningkatan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari misi pembangunan nasional yang terdapat dalam UU RI No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Misi pembangunan yang dimaksud adalah keinginan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Terdapat beberapa kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dapat diperjuangkan Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Masuknya Indonesia sebagai negara dengan kategori *lower middle income country* memberikan peluang yang besar untuk lebih berperan dalam pembangunan dunia. Peran Indonesia saat ini tidak hanya sebagai negara penerima bantuan tetapi juga sebagai negara pemberi bantuan kepada negara-negara berkembang. Di samping itu, keanggotaan Indonesia dalam G-20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk berperan dalam menentukan arah pergerakan ekonomi global. Keanggotaan Indonesia dalam G-20 memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempresentasikan suara negara berkembang. Posisi tersebut akan semakin menguat di tahun-tahun mendatang pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2011 dan Ketua G-20 pada tahun 2013. Sehingga perlu bagi Indonesia untuk lebih memperkuat eksistensinya dalam peningkatan peran Indonesia dalam pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan.

Di sisi lain, dengan masuknya topik Kerjasama Selatan-Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menunjukkan bahwa Kerjasama Selatan-Selatan telah menjadi salah satu prioritas dalam program perencanaan dan pembangunan politik luar negeri Indonesia. Selain

itu, ditandatanganinya *Jakarta Commitment 2009* juga telah memberikan landasan bagi terciptanya Kerjasama Selatan-Selatan yang dilakukan dengan mekanisme triangular. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara yang cukup aktif memberikan bantuan teknik lewat Kerjasama Selatan-Selatan. Bantuan ini terutama diberikan oleh kementerian/ lembaga pemerintah dan meliputi Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, BKKBN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan.

#### **IV.2 Saran**

Berkaitan dengan hal-hal mengenai Kerjasama Selatan-Selatan yang telah di bahas di bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran untuk Kerjasama Selatan-Selatan kedepannya. Yaitu untuk lebih diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dikarenakan masih banyak yang asing dengan istilah Kerjasama Selatan-Selatan, padahal perannya cukup penting dalam ekonomi pembangunan Indonesia. Dan juga dalam penyusunan cetak biru Kerjasama Selatan-Selatan kedepannya agar lebih mencakup visi, misi, dan target-target kepentingan nasional yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya juga akan lebih baik apabila tiap-tiap kementerian/ lembaga instansi terkait saling terkoordinasi dengan baik apalagi dalam penyediaan data yang lebih lengkap dan rapi maka akan semakin baik. Yang terakhir, Kerjasama Selatan-Selatan akan lebih baik jika bisa digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk-produk unggulan di Indonesia.